

BAB I

PENDAHULUAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara sedang berkembang masyarakatnya berada dalam kategori transisi. Masyarakat mulai bergeser dari pola kehidupan tradisional menuju ke pola kehidupan masyarakat modern, namun tidak seluruhnya meninggalkan pola kehidupan tradisional. Hal ini menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dan ini terlihat pada ciri-ciri umum masyarakat negara baru yang dikenal dengan sebutan "*Prismatic Society*". Menurut Lauer, 1993 : 442 masyarakat negara-negara yang sedang berkembang masih mencampur baurkan unsur-unsur yang saling bertentangan ke dalam sistem masyarakatnya, antara unsur-unsur modern dan tradisional. Sebagai akibatnya timbul formalisme yaitu adanya nilai-nilai pengaturan yang ditentukan secara teoritis tapi pada kenyataannya diabaikan dan masih cenderung menganut pola-pola lama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses modernisasi tanpa terelakkan telah melenyapkan atau setidaknya menghancurkan tradisi.

Walaupun masyarakat kita dalam kategori transisi atau sedang berkembang dengan segala cirinya, tetap memerlukan figur pemimpin. Kita ketahui bahwa pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dan khususnya pembangunan pedesaan sangat tergantung pada usaha-usaha mendinamiskan masyarakatnya. Disamping itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan. Dukungan masyarakat tidak begitu saja dapat diperoleh, hal ini disebabkan munculnya

kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di desa. Hal ini disebabkan oleh melemahnya sistem komunal di desa, dukungan tidak dapat diperoleh seperti masa yang lalu, ketika kepala desa secara mudah dapat mengerahkan penduduk untuk kepentingan desanya. Dengan demikian perwujudan pembangunan memerlukan dukungan dari pemimpin dan kelompok yang berkepentingan yang mempunyai pengaruh di desa.

Diakui bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Orde Baru sudah banyak membawa perubahan ke arah kemajuan, tidak hanya di bidang ekonomi, sosial budaya yang diikuti oleh bidang-bidang lainnya seperti : gaya hidup, interaksi sosial, budaya politik, dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, misalnya adanya pengaruh jumlah pendapatan yang meningkat, lapangan pekerjaan yang sangat bervariasi, kemajuan teknologi, komunikasi modern dan sebagainya.

Perubahan yang terjadi di masyarakat juga tidak terlepas dari peran para pemimpin, baik formal maupun informal di dalam kolektifitas sosial terjadi interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin (pengikut). Peran pemimpin dalam mengarahkan dan mempengaruhi pengikutnya menuju pada tujuan kolektif atau membentuk kelakuan masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Status pemimpin dalam masyarakatnya mempunyai fungsi atau peran, mengawasi agar tujuan bersama dapat tercapai. Khususnya dalam masyarakat, pemimpin merupakan *agent of change* yang paling efektif. Kemampuan pemimpin membawa pengikutnya akan membuahkan hasil keikutsertaan masyarakat dengan kesadaran penuh untuk ikut serta mengambil peran membangun daerahnya, bukannya partisipasi semu karena ada

paksaan. Dalam konteks kedaerahan sebutan pemimpin, baik itu yang dipilih oleh masyarakatnya maupun pemimpin yang didapat karena keturunan (*Raja*), memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang secara historis diakui oleh masyarakat.

Tapanuli Selatan merupakan bagian dari penyebaran etnis Batak yang tidak bisa terlepas dari adat budaya *Dalihan Na-Tolu*. *Dalihan Na-Tolu* merupakan perlambangan dari “*Tungku Yang Tiga*”, yang memiliki makna bahwa dalam masyarakat Batak di Tapanuli Selatan memiliki tiga unsur yang membangun satu kesatuan adat budaya. Ketiga unsur tersebut adalah : *Kahanggi*, *Anak Boru* dan *Mora*. Keberadaan raja sendiri merupakan bagian dari adat budaya *Dalihan Na-Tolu* tersebut.

Keberadaan raja ditengah-tengah masyarakat Tapanuli Selatan hingga saat ini masih memiliki fungsi, sehingga keterikatan masyarakat dengan keberadaan raja-raja ini tidak memiliki kekuasaan terhadap rakyat, karena pemerintahan yang syah menurut undang-undang Pemerintahan Negara Republik Indonesia terendah berada dibawah kekuasaan Kepala Desa atau lurah. Permasalahannya adalah bagaimana sebenarnya peran raja-raja ini ditengah-tengah masyarakatnya, dan bagaimana struktur keberadaan raja-raja tersebut, baik dilihat dari latar sejarah keberadaan mereka maupun pandangan masyarakatnya terhadap raja-raja tersebut.

Dari latar sejarah bahwa di Tapanuli Selatan dahulu setiap *huta* (kampung) dikepalai oleh *Pamusuk* atau lebih dikenal dengan *Raja Pamusuk*. Federasi beberapa *huta* dipimpin oleh seorang *Panusunan Bulung* atau *Raja Panusunan Bulung* yang dipilih dikalangan *Raja Pamusuk*. *Raja Panusunan Bulung* merupakan pimpinan terpilih dan didampingi oleh *Raja Pangundian* yang berasal dari salah satu *huta* di

wilayahnya. Disamping itu juga wilayah marga sangat berperan bagi orang Batak, karena marga berkaitan langsung dengan *bona bulu* yang menunjukkan asal keturunan marga seseorang berdasarkan *tarombo marga* yang dimilikinya. Hal ini memberi gambaran betapa semangat kekerabatan yang tinggi dikalangan masyarakat Batak tak terkecuali pada masyarakat Batak di Tapanuli Selatan dimanapun mereka berada. *Raja Pamusuk* maupun *Raja Panusunan* merupakan orang-orang terpilih dalam kelompok masyarakatnya.

Fenomena *Raja* pada masyarakat Batak khususnya di Tapanuli Selatan, merupakan sesuatu yang menarik untuk ditelaah, karena tradisi kepemimpinan berdasarkan garis keturunan ini masih terdapat dalam masyarakat Tapanuli Selatan hingga saat ini, dan wujud dalam berbagai aktifitas masyarakat terutama upacara-upacara adat budaya *Dalihan Na-Tolu*. Nilai kekerabatan ini tercipta karena hubungan darah (*Kahanggi*) dan hubungan perkawinan (*Anak Boru* dan *Mora*), suami, adik/kakak kita "*Anak Boru*" sebaliknya saudara istri kita menjadi "*Mora*". Semangat kekerabatan ini juga diatur dalam tradisi "*martarombo*" (silsilah).

Dalam *Dalihan Na-Tolu* terdapat sejumlah hirarki pengelompokan kekerabatan (*mora, kahanggi, anak boru*) yang saling berkaitan dan berfungsi dalam memenuhi tujuan bersama, memelihara pola, dan mempertahankan kesatuan demi tercapainya keseimbangan dan keharmonisan. Dalam ungkapan tradisional orang Tapanuli Selatan "*Manat sanga pe jamot marhamarangi, elek marboru, hormat marmora*", artinya kita harus berhati-hati kepada *kahanggi*, berlaku sayang kepada *anak boru*, dan selalu hormat kepada *mora*. Ungkapan lain dan makna yang sama, "*sagama markahanggi, holong mar anak boru, dan sangap marmora*". Konsep

Dalihan Na-Tolu inilah yang dijadikan *Raja Najungal* dalam melahirkan kepemimpinan tradisional di Tapanuli Selatan yang harus dijaga dan dipelihara.

Raja Najungal sebutan gelar yang diberikan kepada H. Baharuddin Harahap salah seorang putra Tapanuli Selatan yang berupaya tampil sebagai *Raja* dalam masyarakat adat Tapanuli Selatan berdasarkan sistem budaya *Dalihan Na-Tolu*. *Raja Najungal* memiliki rasa kerinduan untuk mengembalikan sistem pemerintahan *Raja-Raja* masa lalu pada era modern sekarang ini serta rasa keprihatinan beliau atas kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah banyak meninggalkan perilaku adat istiadat di Tapanuli Selatan.

Oleh karenanya penulis melalui karya tulis ini ingin mengetahui lebih jauh mengenai *Raja* dan sebutan *Raja* sebagai pemimpin tradisional serta struktur dan fungsi masyarakat yang membangunnya pada masyarakat Tapanuli Selatan serta kebijakan dan sistem kepemimpinan tradisional yang mereka jalani, dengan meneliti fenomena diseperti masyarakat Batak di Tapanuli Selatan, khususnya fenomena budaya pada *Raja Najungal* dan komunitasnya sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keterkaitan antara *huta*, *marga* dan budaya *Dalihan Na-Tolu* dalam menentukan sosok *Raja* dalam komunitasnya.

2. Apakah ada aturan adat dalam budaya *Dalihan Na-Tolu* untuk menentukan seorang pemimpin mereka yang dipahami sebagai *Raja*.
3. Bagaimana kompensasi yang harus dibayar maupun diterima oleh seorang *Raja* dalam memangku gelar *Raja* dalam komunitasnya.
4. Bagaimana kekuasaan *Raja* dalam masyarakat *huta, marga* dalam kaitannya dengan pemerintah.
5. Bagaimana peran *Raja* sebagai pemimpin dalam komunitasnya untuk membangun masyarakatnya ke arah yang lebih baik.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari identifikasi masalah tersebut di atas dapat diajukan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana struktur kepemimpinan tradisional dalam adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan.
- 1.3.2 Bagaimana fungsi kepemimpinan tradisional dalam adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan.
- 1.3.3 Bagaimana kedudukan *Raja Najunggal* dalam adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan.
- 1.3.4 Bagaimana persepsi masyarakat Tapanuli Selatan terhadap *Raja Najunggal*.
- 1.3.5 Apa yang menjadi obsesi *Raja Najunggal* dalam melestarikan adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana struktur kepemimpinan tradisional dalam adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan dalam kaitannya dengan *huta*.
- 1.4.2 Untuk mengetahui fungsi kepemimpinan tradisional dalam adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan.
- 1.4.3 Untuk mengetahui kedudukan *Raja Najunggal* dalam adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan.
- 1.4.4 Untuk mengetahui persepsi masyarakat Tapanuli Selatan terhadap *Raja Najunggal*.
- 1.4.5 Untuk mengetahui obsesi *Raja Najunggal* dalam melestarikan adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dapat diselesaikan, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

- 1.5.1 Secara teoritis memberikan gambaran tentang *Raja Najunggal* dalam pembangunan adat-istiadat Tapanuli Selatan.
- 1.5.2 Secara praktis memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang kontribusi *Raja Najunggal* dalam melestarikan adat-istiadat Tapanuli Selatan.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Kajian Teoritis

1.6.1.1 Pengertian *Raja*

“*Raja*” dan “Sebutan *Raja*” merupakan bagian dari adat budaya *Dalihan Na-Tolu* bagi laki-laki di Tapanuli Selatan yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. *Raja* merupakan sebutan untuk menyatakan keberadaan pimpinan suatu masyarakat pada wilayah *huta*, sedang sebutan *Raja* adalah gelar yang diberikan oleh masyarakatnya kepada seorang laki-laki yang telah menikah di daerah ini, oleh karenanya kuat dugaan penulis bahwa telah terjadi afkulturasi budaya Batak dan Minangkabau di Tapanuli Selatan.

Secara tradisional *huta* dipimpin oleh seorang *Raja* yaitu *Raja Pamusuk*, *Raja Pamusuk* di *huta* tersebut merupakan keturunan dari *marga tanah* yaitu *marga* dari orang yang pertama membuka *huta* tersebut. Sedangkan pada tingkat yang lebih luar daerah teritorinya dipimpin oleh *Raja* yang dikenal dengan sebutan *Raja Panusunan Bulung*. *Raja* ini memimpin wilayah *Kuria* atau *Luat*. *Kuria* atau *Luat* merupakan federasi dari beberapa *huta* yang saling bertetangga dalam satu wilayah yang diakui bersama. *Raja Panusunan Bulung* merupakan *Raja* yang dipilih bersama dalam permusyawaratan berdasarkan Adat Budaya *Dalihan Na-Tolu* di daerah ini.

Untuk membuka *huta-huta* baru di wilayahnya *Raja* senantiasa bermusyawarah dengan unsur-unsur *Dalihan Na-Tolu*, yaitu *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora* dan wilayah *huta-huta* baru itu merupakan bagian dari wilayah dan pengaruh *Raja Pamusuk huta* induk. *Huta-huta* baru dapat berdiri

sendiri secara otonom apabila sudah diresmikan dengan “pesta besar” (*horja godang*) dan pada saat itulah pemerintah *huta* baru dibentuk dengan tetap mengacu yang menjadi *Raja Panusunan* di *huta* baru itu adalah orang yang pertama membuka *huta* dan para pembantu *Raja* pun ditentukan, maka resmilah susunan pemerintahan tradisional terbentuk.

Seiring dengan berjalannya waktu keberadaan *huta* sebagai sebuah pemerintahan, melemah karena pengaruh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, Jepang, hingga merdekanya wilayah nusantara yang membentang dari Sabang hingga Republik Indonesia, sehingga keberadaan *huta-huta* yang dulu *Raja-nya* memiliki kekuasaan penuh lambat laun kekuasaan tersebut berkurang, dan saat ini keturunan dari *Raja-raja* tersebut tidak memiliki apa-apa kecuali sebagai *Raja* adat di masyarakatnya. Sementara dalam struktur pemerintahan resmi keberadaan *Raja-Raja* adat ini masuk dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD), bekerja sama dengan Kepala Desa untuk memajukan *huta-huta* mereka.

Keberadaan *Raja-raja* adat dalam adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan merupakan sosok pemimpin adat yang melakoni setiap upacara-upacara adat seputar kehidupan (*life cycle ceremonies*) di tengah-tengah masyarakatnya, yang terdiri dari upacara *siluluton* dan upacara *siriaon*. *Siriaon* artinya peristiwa yang dialami seseorang atau keluarga dalam bentuk kegembiraan (suka cita) seperti kelahiran anak, perkawinan, dan memasuki rumah baru. *Siluluton* artinya peristiwa yang dialami seseorang dalam bentuk kesedihan (duka cita) seperti kematian. Bentuk peristiwa ini dalam kehidupan

orang Tapanuli Selatan melibatkan anggota kerabat dengan upacara-upacara adat dan agama. Upacara-upacara tersebut antara lain :

I. Upacara syukuran

A. Upacara *siluluton*

- *Mengupa*
- *Dapaton rasoki*

B. Upacara perkawinan

- Proses *patobang anak, patobang boru.*

C. Upacara kelahiran

- *Tubuan anak tubuan boru*

D. Upacara mendirikan rumah

- *Pajongjong bagas na imbaru*
- *Martoktok*

- *Marbongkot bagas*

II. Upacara *Siriaon*

- *Rato*

- *Mangampelon goar*

- Pidato pemberangkatan jenajah

- *Paginjang batu di Mandailing*

- *Mangongkal paginjang batu di Angkola dan Sipirok*

- *Mangongkal* khusus dilakukan masyarakat non muslim pada upacara pangkat ini. Disebut upacara *siriaon siluluton* karena ada kegembiraan dan kesedihan.

Disamping fungsi *Raja* untuk memimpin upacara-upacara di seputar lingkaran kehidupan masyarakat di bawah teritorial barunya, *Raja* juga menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi. Hal ini diselesaikan dalam rapat adat, dimana rapat adat dilaksanakan untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus pengadilan adat. Terdapat tiga tingkatan rapat adat Budayanya *Dalihan Na-Tolu* yaitu :

- a. Rapat *Sapamusuk*, merupakan rapat pada tingkat kota.
- b. Rapat *Sapanusunan*, merupakan rapat pada tingkat wilayah ke *Kuriaan*.
- c. Rapat *Kuria/Luat*, merupakan rapat besar pada tingkat *Kuria*.

Pemerintah tradisional di Tapanuli Selatan berbentuk kerajaan bersifat *Oligarkhi*. *Raja* sebagai pemimpin eksekutif dibantu oleh *anak boru* dan didampingi oleh *mora* sebagai penasehat. *Dalihan Na-Tolu* sebagai badan legislatif terdiri dari *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* bersama dengan *hatobangon*, yaitu para sesepuh dan cerdik cendikia yang arief dan bijaksana. Mereka ini terdiri dari wakil marga-marga yang berdiam di *huta* yang bersangkutan disebut dengan pimpinan *ripe-ripe*. Selain mewakili *ripe* para pemuka agama (Islam) tergolong dalam *hatobangon*. Pada abad yang lalu, masyarakat *bona bulu* pernah dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu : golongan bangsawan yang disebut *na mora-mora*, golongan kebanyakan disebut *halak na jaji*, dan golongan budak disebut *hatoban*. Pada tahun 1976 pemerintah Kolonial Belanda secara resmi menghapuskan perbudakan di daerah ini.

Setelah masuknya Islam dan menjadi agama resmi masyarakat terjadi perubahan lapisan sosial di Tapanuli Selatan yang melahirkan dua bentuk kepemimpinan sosial yaitu : *Pertama*, pemimpin adat (*Raja*) untuk masalah-masalah yang terkait dengan adat istiadat. *Kedua*, pemimpin keagamaan (ulama) untuk masalah yang berkaitan dengan keagamaan. Untuk daerah Mandailing posisi ulama atau pemuka agama lebih dominan daripada posisi pemuka adat, sebaliknya di daerah Angkola posisi pemuka adat lebih dominan.

Baharudin Harahap merupakan sosok *Raja* dari seribu banyak *Raja* yang terdapat di Tapanuli Selatan yang ingin mengembalikan semangat sistem kerajaan masa lalu dalam era modern sekarang ini di Tapanuli Selatan. Tokoh Baharudin Harahap bergelar sultan Desa *Nawalu Ompu Toga Langit Daulat Raja Tuan Tua Patuan Nagaga Najungat* Tapanuli Bagian Selatan merupakan sosok yang gigih memperjuangkan keberadaan adat budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan dengan segala jerih payah dan pemikiran beliau, ditengah-tengah terjadinya erosi budaya karena globalisasi budaya melalui media televisi, telekomunikasi dan sebagainya.

1.6.1.2 Kepemimpinan

Pada dasarnya berbicara masalah kepemimpinan adalah membicarakan masalah kelompok, namun bukan berarti tidak membicarakan kepemimpinan dalam arti personal atau individu. Kelompok akan memilih atau menjatuhkan pilihan mereka terhadap orang atau individu yang memiliki kelebihan-

kelebihan tertentu, terutama bagaimana dia dapat melakukan tindakan-tindakan menegerial diantara orang-orang disekitarnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Leopold Pospisil dalam Ihromi (1993 : 125) yang

mengemukakan bahwa hubungan diantara para anggota dari suatu kelompok mendemonstrasikan suatu pola struktural yang sifatnya ditentukan oleh banyak anggotanya, sifat fungsional dari kelompok itu, konteks budaya dan nilai-nilai yang berpengaruh pada perilaku para anggota, pernyataan mengenai tujuan dari eksistensi kelompok itu dan sumber ekonomis yang tersedia, lebih jauh dijelaskan bahwa disamping faktor-faktor yang memainkan pengaruh tersebut, pola itu juga menunjukkan adanya suatu struktur kekuasaan tertentu yaitu pengaruh potensial dari seorang anggota kelompok terhadap anggota lainnya.

Untuk dapat memiliki pengaruh seorang pemimpin biasanya memiliki kelebihan-kelebihan individual dibanding anggota kelompok lainnya, sehingga dengan kelebihan yang dimilikinya dapat mempengaruhi orang-orang disekitar dan bahkan di luar kelompoknya, dan ini merupakan sifat-sifat/kelebihan-kelebihan individual yang dimiliki seorang pemimpin Leopold Pospisil dalam Ihromi (1993 : 125) menjelaskan lebih jauh sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan dimiliki oleh setiap orang yaitu jenis kelamin, umur, watak, kearifan, pengalaman, sifat agresif, keterampilan, kekayaan, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Oleh karenanya kepemimpinan adalah gejala universal yang berlaku pada setiap orang dalam kelompoknya dan terhadap kelompok yang lain.

Wignjodipuro, (1982 : 91) memberikan gambaran tentang sifat pimpinan kepala-kepala rakyat yang bertugas memelihara jalannya hukum adat sebagaimana mestinya. Sifat pimpinan kepala rakyat sangat erat hubungannya dengan sifat, corak serta suasana masyarakat didalam badan-badan persekutuan hukum tersebut. Persekutuan hukum tidak bersifat badan kekuasaan dan bersifat kekeluargaan yang merupakan kesatuan hidup bersama. Soekanto (1990 : 318) menjelaskan kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pimpinan atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pimpinan tersebut lebih jauh dijelaskan bahwa kepemimpinan ada yang bersifat resmi (*formal leadership*) yaitu kepemimpinan yang tersimpul didalam suatu jabatan, sementara kepemimpinan tidak resmi (*informal leadership*) adalah kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan tidak resmi mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi dalam bentuk landasan-landasan maupun peraturan-peraturan resmi, seperti dalam kepemimpinan formal. Karena kepemimpinan tidak resmi didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat maka ukuran besar atau tidaknya kepemimpinan terletak pada tujuan dan hasil pelaksanaan kepemimpinan tersebut menguntungkan atau merugikan komunitasnya.

Uraian mengenai kepemimpinan ini penting untuk menjelaskan mengenai sistem kepemimpinan tradisional di Tapanuli Selatan yang sudah

berlangsung hingga saat ini. *Raja Najungal* merupakan kasus yang akan dipelajari dengan melihat dari berbagai sisi pandang, keberadaan *Raja*, struktur masyarakat, fungsi *Raja* dalam komunitasnya serta adat *Dalihan Natolu* sebagai falsafah kehidupan orang Batak itu sendiri sebagai pengikat kehidupan bermasyarakat bagi orang Batak.

1.6.1.3 Tradisional

Secara etimologi kata tradisional berasal dari bahasa Inggris “*traditional*”, merupakan kata sifat dan memiliki makna pengulangan kebiasaan-kebiasaan tingkah laku dalam kehidupan manusia, baik pribadi maupun kelompok dari satu generasi ke generasi berikutnya. Taufik Abdullah dalam Azra (2003 : 4) menyatakan kelanjutan nilai-nilai kebijaksanaan tradisi lama dalam kehidupan masyarakat.

Wignjodipuro (1982 : 96) menyatakan hidup bersama didalam masyarakat tradisional bercorak kemasyarakatan/komunal. Manusia didalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya terutama dalam hukum adat. Menurut paham tradisional hukum adat adalah warga golongan, tiap-tiap warga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya didalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan. Hal seperti itulah yang dikatakan sebagai nilai-nilai budaya. Sementara itu, Simanjuntak (2000 : 366) menyatakan, nilai budaya yang menjadi tujuan dan pandangan hidup ideal asli orang Batak Toba dirumuskan didalam rangkaian tiga kata yaitu

hasoroan, hagabeon, hasangapon, “kekayaan, keturunan dan kehormatan”.

Namun nilai-nilai budaya yang menjadi tujuan dan pandangan hidup bagi orang Batak itu harus memiliki landasan hukum tradisional yang tidak dapat

diubah. Verqauwen (1986 : 156) mengatakan salah satu prinsip dasar hukum

tradisional ialah bahwa ia tidak dapat diubah. Hukum diagungkan sebagai

“adat istiadat leluhur yang pertama lahir ke dunia, *sahala, leluhur, adat ni*

ompunta na jumolo tubu, sahala ni amanta”. Satu konsep yang menjunjung

kearifan nenek moyang, hukum mendapat kesucian tertentu dari kenyataan

bahwa asal mulanya ada disuatu masa ketika para peluhur masih hidup dan ini

meningkatkan wataknya yang mengikat.

Berkaitan dengan penjelasan dan diskusi yang telah dipaparkan

didepan mengenai kepemimpinan maka pemahaman yang dapat dibangun dari

pemaparan tradisional terhadap bentuk kepemimpinan tersebut adalah adanya

usaha-usaha dari generasi sekarang untuk terus melestarikan adat budaya yang

tumbuh pada masyarakat yang secara tradisional telah diwariskan dan perlu

upaya-upaya untuk tetap menjaga kebermaknaan budaya tersebut ditengah-

tengah komunitasnya. *Raja Najungal* merupakan satu dari sekian banyak

penerus tradisi tersebut oleh karenanya layak untuk dipelajari dan didalami

menjadi sebuah kajian antropologis.

1.6.2 Kajian Pustaka

Buku Pengamalan Budaya *Dalihan Na-Tolu* (2003) dan *Poda-Poda Ni Adat*

Dalihan Na-Tolu Ke-kekeluargaan Ni Tapanuli Selatan (1991) menjelaskan tentang

konsepsi pengamalan *Dalihan Na-Tolu*. Kata ini diambil dari *DALIHAN* (Tungku), *TOLU* = TIGA yang berarti “Tiga Tungku”. Ketiga *Dalihan Na-Tolu* ini dicontohkan kepada Paradatan *Dalihan Na-Tolu* yang mempunyai fungsi sama akan tetapi berbeda dalam tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Paradatan *Dalihan Na-Tolu* merupakan kekuatan. Peradatan yang ada dan memberi sumber dari semua Peraturan-Peraturan Adat yang ada.

Dalam Monografi Kebudayaan Angkola-Mandailing (1982). Buku ini memberikan informasi Sejarah Adat di Tapanuli Selatan seperti dalam musyawarah adat/budaya *Dalihan Na-Tolu*, “Raja Panusunan Bulung” pasti memberi kesempatan berbicara kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya, yaitu “*Kahanggi, Anak Boru, Mora*”, Raja-raja “*Torbing Balok*” (Raja sekitar) minimum 8 Raja, yaitu *Natobang-Natoras*. Dimana kemudian “*Raja Panusunan Bulung*” yang bertugas untuk menyimpulkan pendapat-pendapat dari semua pembicaraan tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana praktek demokrasi berlaku dalam *Dalihan Na-Tolu*. Buku ini banyak menjelaskan misalnya disebutkan bahwa sebelum kehadiran Kolonial Belanda, pemerintah tradisional tertinggi dikepalai oleh *Raja Panusunan* yang membawahi beberapa kampung yang dikepalai oleh *Raja Pamusuk*. Tapanuli Selatan terdiri atas beberapa *Luat*, seperti Sipirok, Angkola, Marancar, Padang Bolak, Barumum, Mandailing, Batang Natal, Natal, Sipiongot dan Pakantan. Satu *Luat* disebut juga *Banua*. *Luat/Banua* adalah merupakan satu kesatuan dalam hukum adat, pemerintahan dan teritorial. Sejalan dengan itu hampir pula dapat disebut satu kesatuan geneologis.

Simanjuntak (1998) menjelaskan tentang struktur sosial dan sistem politik Batak Toba hingga 1945 dalam sebuah pendekatan sejarah dan antropologi politik. Dalam laporan penelitian ini beliau menjelaskan keterkaitan sejarah orang Batak dan perubahan sosial yang dilatar belakangi oleh perkembangan sosial budaya yang bergerak sangat cepat dewasa ini dan berdampak terhadap kehidupan dan pergaulan sosial orang Batak Toba di Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan ini menjelaskan struktur sosial masyarakat Batak dengan segala pengaruh budaya yang mempengaruhinya khususnya pemerintahan Kolonial Belanda.

Strategi Kebudayaan (1989) oleh Puersen menggambarkan tentang perkembangan kebudayaan pada masyarakat sekarang ini yang bagaikan sebuah bagan sehingga penulis dapat menghubungkan dengan perubahan budaya *Dalihan Na-Tolu* masyarakat Angkola di Tapanuli Selatan dalam bentuk yang lebih sederhana.

Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Perspektif Antropologi (2002) oleh Sairin menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, bagaimana kebudayaan dan perilaku sosial dan bagaimana industri menumbuhkan berbagai perubahan yang menimbulkan dinamika sosial, sehingga memiliki hubungan dengan masalah yang sedang penulis teliti dalam melihat eksistensi dan kedudukan '*Raja Najungal*' di Tapanuli Selatan.

Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat (1984) oleh Soekanto menggambarkan bahwa suatu komunitas tidak begitu saja muncul, tetapi memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, bahwa masyarakat tersebut memiliki

solidaritas ke dalam cukukp tinggi sebagai suatu integrasi yang dapat dijadikan sebagai identitas sosial, sehingga berbeda dengan komunitas atau kelompok sosial yang lain.

1.6.3 Kerangka Berfikir

Kebudayaan dan pembangunan adalah dua konsep yang dapat dilihat saling berkaitan. Menurut Suparlan (1986), kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang terdiri atas perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh para pendukung atau pelakunya untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi. Lebih lanjut Suparlan menyatakan bahwa kebudayaan menyangkut cara-cara hidup dari suatu masyarakat yang mengikuti pola-pola tertentu dan cara hidup tersebut mengacu kepada suatu pedoman bagi hidup mereka. Kebudayaan tidaklah statis, karena mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat pendukungnya dalam beradaptasi dengan lingkungan secara aktif.

Terjadinya perubahan-perubahan itu berasal dari dua sumber yaitu perubahan yang berasal dari dalam sistem sosial itu sendiri yang disebut dengan perubahan *imanane*, dan perubahan yang berasal dari luar sistem sosial itu sendiri disebut dengan perubahan *kontak*. Perubahan *imanane* itu terjadi karena keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk maju dan mengembangkan potensi yang dimilikinya seperti keinginan untuk menambah pengetahuan, mengembangkan kebudayaan yang dimiliki dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan kontak terjadi karena adanya

pengaruh yang berasal dari luar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Perubahan kontak ini dapat bersifat selektif dan terarah. Kontak selektif dapat terjadi pada suatu masyarakat jika anggota sistem sosial itu terbuka pada pengaruh dari luar dan menerima atau menolak ide baru itu berdasarkan kebutuhan yang dirasakan sendiri dan dapat terjadi secara spontan atau bebas memilih. Perubahan kontak terarah atau terencana merupakan suatu perubahan yang sengaja dilakukan akibat adanya pengaruh luar atau sebagian besar dari anggota sistem sosial itu bertindak sebagai agen pembaru yang secara intensif memperkenalkan ide tersebut. (Lionberger, dalam Lauer 1993 : 389).

Perubahan sosial maupun perubahan budaya yang terjadi bagi masyarakat Indonesia lebih banyak tersorot dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang terjadi akibat program pembangunan. Perubahan sosial yang berlangsung melalui tiga tahap yaitu : *Pertama*, tahap invensi (suatu proses dimana ide baru itu diciptakan dan dikembangkan). *Kedua*, tahap difusi (suatu proses dimana ide-ide baru itu dikomunikasikan kedalam sistem sosial). *Ketiga*, tahap konsekuensi (suatu proses perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi). Dengan demikian, perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi atau sistem sosial dalam suatu masyarakat. (Everett M. Rogers dan F. Floyd Schomaeker, dalam Lauer 1993 : 390).

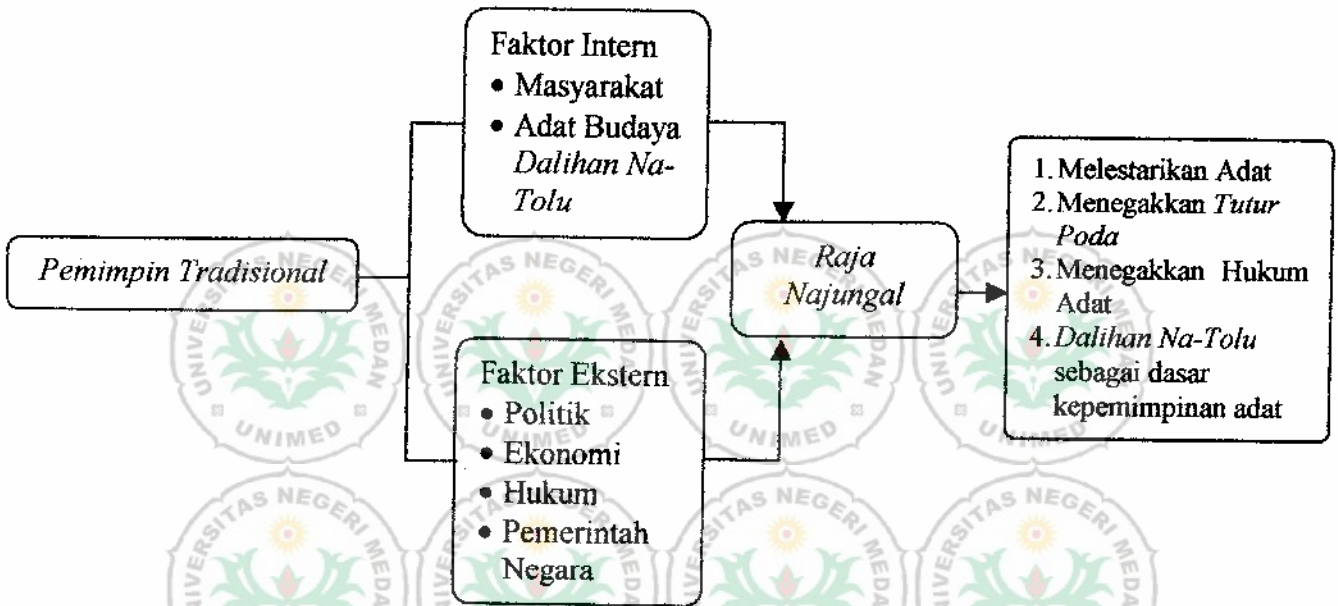
Perubahan yang terjadi terhadap sebuah unsur kebudayaan dapat mempengaruhi unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat pendukungnya, karena unsur-unsur kebudayaan itu mempunyai fungsi yang hampir sama dengan fungsi dari kebudayaan yang lainnya. Sehingga perkembangan kebudayaan itu sangat tergantung

pada kepekaan masyarakat untuk memahami tantangan dan kemampuan masyarakat mengembangkan penemuan-penemuan baru atas dasar peluang-peluang yang ada. Tetapi dalam kaitannya dengan penciptaan tradisi-tradisi baru dan juga usaha untuk mempertahankan tradisi-tradisi lama.

Mengacu kepada Barth, bahwa kelompok etnik dapat dipandang sebagai suatu tatanan sosial yang dapat menentukan ciri khasnya sendiri sehingga dapat dilihat kelompok lain. Kelompok etnik sebagai tatanan sosial terbentuk bila seseorang menggunakan identitas etnik dalam mengelompokkan dirinya dan orang lain untuk tujuan interaksi. (Barth, 1969 : 15).

Raja Najunggal sebagai pemimpin tradisional pada masyarakat Tapanuli Selatan yang sangat berpengaruh dan menempati suatu kedudukan sosial yang didapat oleh ketentuan adat, dimana *Raja Najunggal* menduduki suatu posisi tertentu dan melakukan tindakan-tindakan atau wewenangnya untuk mempengaruhi perilaku suatu kelompok atau masyarakat di Tapanuli Selatan.

Maka *Raja Najunggal* dalam mempertahankan identitas kelompok ditentukan oleh faktor *isolasi geografis* dan *isolasi sosial*. Barth (1998 : 11-12) menyebutkan bahwa tiap-tiap kelompok etnis mengembangkan budaya dan bentuk sosialnya dalam kondisi terisolasi. Dari penjelasan di atas, dapat diambil kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka *field work* (wilayah kerja) dalam penelitian ini difokuskan pada *Raja Najunggal* di Tapanuli Selatan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan terpilih (*purposive informant*) sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan penelitian.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang lebih dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis melakukan teknik wawancara terarah dengan mengajukan ulang hasil yang didapat kepadanya juga dipandang sangat baik untuk mengkresek berbagai data yang diperoleh kepada masyarakat di Tapanuli Selatan untuk mendapatkan data yang memiliki validitas yang baik.

Disamping aplikasi metode wawancara mendalam dan wawancara bertingkat, juga dilakukan metode observasi partisipasi (*participatory observation*). Baik secara

langsung ataupun dengan melakukan berbagai pertemuan, diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat secara terarah dan kunjungan kerumah (*home visit*). Dalam diskusi kelompok terarah ini, peneliti melakukan pengamatan secara intensif dengan bertindak sebagai moderator, dan hasil diskusi ini menjadi dasar pijakan kedepan bagi penulis untuk semua informan secara tidak sadar akan mengutarakan pendapatnya secara objektif, transparan dan secara komprehensif (menyeluruh).

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini, diupayakan melakukan beberapa kali diskusi serta debat data, kegiatan ini sekaligus sebagai batu loncatan untuk melakukan analisa data awal, dengan menggunakan metode VERSTEHEN yaitu pengamatan di lapangan berdasarkan fenomenologis.

1.7.2 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain :

- a. Observasi, digunakan sebagai upaya untuk mengamati berbagai fenomena baru yang berhubungan dengan *Raja Najunggal* dan komunitasnya di Tapanuli Selatan.
- b. Wawancara, teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung kepada sumber menyangkut tentang *Raja Najunggal* di Tapanuli Selatan, serta data yang dapat menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab dan implikasi yang ditimbulkannya terhadap masyarakat di Tapanuli Selatan.
- c. Dokumentasi, untuk mendapatkan data menyangkut tentang *Raja Najunggal* di Tapanuli Selatan, mulai dari faktor penyebab serta aspek-aspek yang dipandang mendukung data yang diperlukan.

1.7.3 Tehnik Analisa Data

Dilakukan setelah data lapangan dikumpulkan, data kepustakaan diperoleh, survei, pengamatan dan wawancara sudah dilakukan, maka semua yang diperoleh ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan dengan tujuan agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan ulang atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. (Moleong, 1994 : 178).

Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi (Patton, 1987 : 31) di dalam penelitian ini dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang ada relevansinya. Penyajian data yang dikumpulkan dapat diarahkan kepada penjelasan tentang *Raja Najungal* di Tapanuli Selatan.

1.7.4 Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei 2005 s/d Juli 2006. Selama itu peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh berasal dari warga masyarakat Tapanuli Selatan khususnya di Desa Janji Mauli Kecamatan Angkola Jae Kabupaten Tapanuli Selatan.